

Implementation of the Public Relations Function at the Secretariat of the Pati Regency House of Representatives

Iqbal Maulana Firdaus & Angga Intueri Mahendra

Department of Communication Sciences, Universitas Amikom Yogyakarta, D. I. Yogyakarta, 55281, Indonesia

Abstract

As one of the government agencies in Indonesia, public relations within the scope of the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly of Pati Regency has an obligation to provide information related to policies, as well as with new regulations stipulated by members of the council. Public Relations itself has an important role and an important function as well in assisting a task from the government related to the delivery of information and mediation using various mass media and online media. The purpose of this study is to determine the implementation of the functions of a public relations officer within the scope of the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly of Pati Regency. The research method used in this research is descriptive by selecting an informant using a purposive sampling technique. The results of research from a public relations officer at the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly of Pati Regency are In this case it shows that the role according to the expert above shows that there are only three roles related to the functions and duties within the scope of public relations of the Pati Regency Dprd Secretariat, namely as a Communication Facilitator (Communication Facilitator). , As a Problem Solving Process Facilitator, and as a Communication Technician and expert advisors are not included because the public relations agency Secretariat of the Pati Regency Dprd is an institution that is still under the auspices of the Pati regional government where all responsibilities such as duties and the function is determined by the regional government of Pati. That way this institution does not stand alone but is still under the auspices of the Pati district government.

Keywords: implementation of public relations, function of public relations, role of public relations.

1. Pendahuluan

Humas atau biasa disebut hubungan masyarakat sejatinya merupakan salah satu fungsi manajemen, karena di dalam berbagai kegiatannya, seorang humas melakukan beragam pekerjaan manajemen, dimulai dari perencanaan, penyusunan program-program, pelaksanaan program-program, mengevaluasi program, melakukan umpan balik dan melakukan perencanaan baru. Begitulah sebuah siklus yang dilakukan seorang humas, dalam merencanakan semua program atau kegiatan yang nantinya dikerjakan humas juga memiliki sebuah peran sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam arti sesungguhnya secara organisasional maupun pemimpin kondisional.

Pemimpin disini juga berarti memimpin team yang terdiri dari berbagai orang melaksanakan semua kegiatan yang telah dibuat dan untuk mencapai tujuan bersama. Tugas utama yang dimiliki oleh seorang humas ialah membangun sebuah citra dari salah satu organisasi, lembaga, maupun sebuah perusahaan. Maka untuk menjadi seorang humas, dibutuhkan keterampilan dan keahlian yang khusus seperti keterampilan berkomunikasi dengan baik, keterampilan dalam bernegosiasi, dan keterampilan dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan.

Humas atau yang lebih dikenal sekarang ialah PR merupakan aktivitas yang berupaya mengelola penyebaran informasi kepada khalayak baik individu atau organisasi masyarakat. Menurut Betty (2012) *public relation* merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik.

Humas juga dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang mendapatkan eksposur ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik, *press release* dan berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung.

* Corresponding author.

E-mail address: iqbalmf91@gmail.com

Tujuan dari hubungan masyarakat oleh perusahaan sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu tentang hal itu, kepemimpinannya, produk, atau keputusan politik. Kegiatan umum termasuk berbicara di konferensi, memenangkan penghargaan industri, bekerja sama dengan pers, dan komunikasi karyawan. Sebagai sebuah profesi seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih, simpati.

Terdapat sebuah fenomena atau kejadian yang telah terjadi dimasa lampau terkait tugas dan fungsi humas dalam membantu pekerjaan dari perusahaan maupun lembaga dimana ada salah satu maskapai penerbangan yang memiliki sebuah permasalahan yang mengakibatkan angka kepercayaan terhadap maskapai Air Asia dimana para pengguna atau penumpang dibuat resah dan gelisah tentang adanya isu atau informasi terkait hilang kontak sebuah pesawat terbang yang memiliki rute Singapura tujuan Surabaya yang mengalami hilang kontak dengan adanya isu atau permasalahan tersebut seorang humas langsung turun tangan dan menjelaskan dan memberikan informasi terkait hal tersebut dengan cara mengadakan press release dan bertemu langsung dengan para korban dengan adanya solusi itu bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap maskapai penerbangan itu kembali semula (Humas, 2014).

Fakta ini terlihat disalah satu website dan pemberitaan di www.Materiips.com dan Liputan.com yang dimana kejadian atau hal tersebut benar terjadi akan tetapi dari pihak direktur dan humas telah memberikan sebuah penjelasan terkait hilang kontak dari pesawat yang bertujuan Singapura dari Surabaya bahkan ada beberapa alasan yang dimana jadwal penerbangan yang harusnya pukul 7 pagi dimajukan menjadi pukul 5 pagi dengan mengirimkan email kepada para penumpang maskapai.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang hubungan masyarakat (humas) memiliki peranan yang penting dan fungsi yang penting bagi penyelesaian perkara atau masalah yang dihadapi oleh pihak perusahaan maupun organisasi dan lembaga. Dimana didalam semua kebijakan yang dilakukan tidak akan terlepas dari fungsi dan tugas seorang humas didalamnya, dengan begitu perusahaan akan mendapatkan kepercayaan yang baik dan bagus dikalangan masyarakat dengan adanya hal tersebut dapat juga menjaga citra baik yang dimiliki oleh pihak perusahaan, organisasi, dan lembaga.

Hal ini melihat peran, tugas, dan fungsi seorang humas secara umum humas itu sendiri tidak hanya ada di perusahaan akan tetapi dilembaga seperti pemerintahan yang dimana tugasnya masih sama akan tetapi sudut pandang yang dimiliki keduanya ada sebuah perbedaan yang dimana tugas seorang humas dalam ruang lingkup pemerintahan dimana mereka akan membantu pemerintahan dalam melakukan segala kebijakan, peraturan yang dimana nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat (Mauliqa, 2021).

Humas pemerintahan sendiri memiliki sebuah pengertian yang dimana masih sama dengan humas yang ada di perusahaan dan organisasi, menurut ahli Frank Jefkins humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (Lani & Handayani, 2021).

Dalam kehumasan pemerintah dan non pemerintah memiliki sebuah perbedaan baik dari bentuk fungsi maupun tugas dan perbedaan itu ialah dalam bentuk tidak adanya komersial, walaupun dalam humas pemerintah juga melakukan hal yang dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan, humas pemerintah lebih menenankan pada pelayanan publik atau demi meningkatkan pelayanan umum.

Di dalam sebuah lembaga instansi pemerintahan humas sering disebut *sekretaris pers*, *Information officer*, *public affair specialist*, atau *communications specialist*, dimana bertugas menginformasikan pada publik mengenai sebuah aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah. Humas juga berurusan dengan publisitas institusi serta berurusan dengan semua aspek pekerjaan. Humas akan menghubungi orang-orang merencanakan dan melakukan penelitian dan menyiapkan material untuk distribusi. Adapaun juga humas mengurus pekerjaan advertising atau promosi untuk mendukung kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah.

Dengan melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijakan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktifitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban pemerintahan. Menurut John D. Millet dalam sebuah bukunya *Management in public service the Quest for effective Performance* memberikan sebuah keterangan tugas utama yang dilakukan oleh seorang humas ialah mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan publik, kegiatan dalam memberikan saran, kemampuan dalam mengusahakan hubungan yang memuaskan, dan terakhir memberikan penerangan dan informasi dalam instansi pemerintah.

Fungsi dari seorang humas dalam instansi ialah menjadi ujung tombak dalam menghadapi permasalahan yang ada di instansi pemerintah, oleh karena itu sangat diperlukannya seorang humas berada diruang lingkup pemerintah, untuk membantu dalam menghadapi sebuah persoalan maupun membantu memperbaiki citra yang tidak baik di kalangan masyarakat. Dan apa yang diucapkan oleh seorang humas menyangkut berdirinya lembaga maupun instansi.

Dan dengan adanya keberadaan sebuah unit kehumasan didalam lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan aktifitas instansi bersangkutan yang bertujuan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam , maupun masyarakat diluar pada umumnya. Humas juga disebutkan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak, dan media tv.

Hal ini bisa kita lihat dimana tugas seorang humas bukan hanya melakukan publikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat akan tetapi juga memiliki tugas menjadi wadah atau perantara dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat dengan instansi pemerintah, dengan adanya humas di instansi pemerintah akan terbantu dan pemecahan masalah akan terselesaikan dengan baik.

Didalam pemerintahan humas memiliki sebuah kedudukan yang telah dikutip oleh Cultip and Center (2000) dalam (Nugraha, 2014) mengatakan bahwa idealnya Humas itu dimaksudkan ke dalam staf inti , langsung berada dibawah pimpinan *Decision makers* atau *top manager* supaya lebih mampu dalam menjalankan tugasnya. Menurut Edward L. Bernay dalam bukunya *Public Relations* (1952, University o Oklahoma Press). terdapat 3 fungsi utama humas :a) Memberikan penerangan kepada masyarakat. b) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. c) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya (Ruslan, 2010). Dengan posisi itu humas dapat mengetahui langsung latar belakang dari suatu keputusan yang diambil oleh pimpinan lembaga; sehingga humas langsung dapat bahan informasi untuk disampaikan kepada publik yang bersangkutan jadi idealnya humas itu berfungsi sebagai saluran langsung dari lingkungan dimana terjadi proses pengambilan keputusan kepada masyarakat agar keputusan yang dibuat itu dipahami dan diterima. Selain itu humas juga berterus terang menampung suara-suara atau tanggapan masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan-tindakan yang di ambil oleh instansi atau lembaga bersangkutan.

Humas bukan hanya membantu dalam penyelesaian terhadap pemerintahan humas juga memiliki sebuah peran apabila dipemerintahan ada sebuah bencana yang dimana dapat menimbulkan sebuah kepanikan yang dapat menimbulkan kisruh yang parah di lingkungan masyarakat, dengan adanya bantuan dari seorang humas akan dapat meredakan sebuah kepanikan yang terjadi saat bencana seperti halnya yang dilakukan salah seorang humas membantu dan mensosialisasikan bencana wabah yang telah melanda di Indonesia peran seorang humas akan terlihat di salah satu kasus tentang pandemi covid yang dimana sedang melanda Indonesia saat ini (Humas, 2020).

Pandemi Covid telah memunculkan ketidakpastian di segala bidang yang memunculkan sebuah tatanan baru tentang “New Normal” sebuah hal yang mengatur cara hidup yang baru dari wabah yang terjadi saat ini, selain itu akibat dari wabah covid ini memberikan sebuah dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dimana mereka kehilangan pekerjaan, hidup dengan memakai masker setiap hari, adanya tindakan lockdownn atau pembatasan aktifitas secara besar-besaran dikalangan masyarakat, dan bukan satu dampak yang dirasakan masyarakat masih banyak sekali dampak dari penyakit wabah covid ini. Pemerintah adalah salah satu pihak yang menjadi tonggak atau tumpuan awal dari harapan seluruh masyarakat Indonesia ditengah wabah yang melanda, pemerintah pun tidak tinggal diam dimana mereka memberikan sebuah pertolongan, bantuan, dan arahan untuk menghadapi wabah ini. Dengan bantuan dari seorang humas yang dimana mereka menjadi sebagai manajemen komunikasi dari pihak pemerintah untuk memberikan informasi dan penjelasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah virus covid tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak humas dan satgas sangatlah berarti setiap harinya memiliki potensi yang sangat besar untuk menghadapi wabah covid ini, dengan adanya program pemerintah yang disampaikan oleh humas akan berdampak besar bagi berkelanjutan kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini.

Hal ini dapat memperlihatkan peran seorang kehumasan dalam membantu penyampaian dan pembublikasikan tentang sebuah aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk memulai sebuah tatanan hidup yang baru dari wabah covid yang sedang melanda Indonesia sekarang dan akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan New Normal dengan bantuan dari seorang humas agar masyarakat mengetahui dengan baik dan jelas tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui seorang humas.

Berkaitan dengan peran yang didalam oleh seorang humas di ruang lingkup pemerintah dalam menangani sebuah perkara atau masalah yang ada dipemerintah sosok humas akan maju paling depan dimana seorang humas akan

menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan baik dan benar tanpa menimbulkan sebuah perkara lain lagi. Dimana humas merupakan salah satu bagian yang vital dan sangat berperan didalam membantu penyelesaian masalah yang tengah dihadapi pihak pemerintah. Adapun perkara yang menunjukkan sebuah peranan penting dan keterlibatan seorang humas dalam membantu penyampain informasi dan kebijakan baru yang berkaitan dengan pandemi covid yang melanda pada tahun 2020 lalu.

Pranata Humas Pemkot Depok Rita Nurlita sebagai salah satu narasumber mengatakan, pranata humas dilibatkan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerahnya. Adapun tim Gugus Tugas terdiri dari tim pencegahan, penanganan tim komunikasi. Nah, di tim komunikasi itulah, Dinas Kesehatan, Dinas kominfo, dan lurah sangat berperan dalam sosialisasi. “Merekalah yang berperan sebagai *key opinion leader*,” katanya.

Sosialisasi yang dilakukan antara lain menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan Covid-19, menyosialisasikan kebijakan dan edukasi/promosi tentang Kesehatan. Misalnya, menyosialisasikan kebijakan terkait penutupan mal, alun-alun dan tempat ibadah, hingga memantau harga-harga kebutuhan dasar dan kebutuhan medis. Sementara terkait edukasi, timnya bertugas untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Dewi, 2022).

Rita juga menekankan *third party endorser* agar pesan makin efektif. Seperti ketika mereka melibatkan tokoh agama untuk meluruskan informasi terkait hukum menolak jenazah dari sudut pandang agama. Mereka juga melibatkan ahli virus untuk mendukung kredibilitas informasi.

Sebagai pranata humas, Rita tidak menampik bahwa ia menemukan beberapa kendala selama melakukan perannya selama pandemi. Seperti, masih banyak laporan tentang masyarakat yang belum taat aturan jaga jarak fisik (*physical distancing*). “Ada yang sudah sadar untuk tetap di rumah, tapi tidak sedikit juga yang masih *nongkrong* di luar,” ujar Rita.

Sementara itu, Pranata Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Gede Alfian melakukan upaya promotif mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dengan melibatkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gugus Tugas Pemprov Jawa Timur juga melakukan upaya kuratif seperti pelacakan (*tracing*) pasien positif Covid-19. “Dari sinilah kita bisa memitigasi penyebaran Covid-19,” ujarnya seraya menambahkan, upaya kuratif ini melibatkan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo sebagai juru bicara.

Mengingat wilayah Jawa Timur yang luas, Gede bersama tim Gugus Tugas menekankan pentingnya menentukan *key opinion leader* di tiap wilayah. Contoh, untuk wilayah Madura, mereka menggadeng kyai karena sosoknya disegani masyarakat.

Lain lagi dengan pengalaman Pranata Humas Diskominfo Kabupaten Magelang Fany Rachmawati. Mereka harus berhadapan dengan masyarakat yang nekat mudik. “Kami manfaatkan semua kanal informasi, bahkan toa sekalipun, untuk menyampaikan imbauan, edukasi dan sosialisasi,” katanya.

Selain itu, mereka juga harus berhadapan dengan maraknya hoaks tentang Covid-19. Menurut Fany, cara yang menurut mereka paling ampuh untuk mengatasi hoaks saat ini adalah membanjiri masyarakat dengan informasi positif. Antara lain, mengedepankan informasi pasien yang sembuh dan menyampaikan lebih banyak informasi positif via medsos.

Rita sependapat, “Saat ini praktisi humas dituntut lebih kreatif lagi dalam membuat dan mengemas konten positif,” katanya. Termasuk, memerhatikan penggunaan kalimat yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal yang terkait diatas menjelaskan peran humas dalam penyampaian informasi terkait dengan pandemi covid diantaranya adanya penyampaian edukasi dan penyuluhan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pihak humas menyampaikan hal itu dengan berbagai cara seperti sosialisasi, pembuatan video atau konten tentang edukasi dari kebijakan pemerintah yang baru tentang pandemi covid dan menggunakan bermacam cara lainnya, dengan begitu humas memiliki sebuah peranan besar dan penting untuk penyebaran sebuah informasi, kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah.

Dengan peranan yang dimiliki oleh humas didalam membantu pemerintahan dapat memberikan dampak yang terbilang sangat besar. Didalam sebuah unit kehumasan pasti memiliki hal istimewa atau unik yang belum tentu dimiliki oleh pihak humas lain seperti halnya memiliki sebuah kerja sama dengan pihak media luar dari ruang lingkup humas pemerintah yang ada, dimana kebanyakan humas memakai atau memiliki sebuah media gunanya untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintah melalui media massa humas itu sendiri digunakan untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat luas.

Dan pihak humas dari salah institusi pemerintahan yaitu humas dari DPRD Kabupaten Pati memiliki sebuah kerja sama antara semua media massa maupun online yang ada di daerah Kabupaten Pati, dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak humas DPRD Kabupaten Pati dapat mempermudah untuk penyampaian informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru maupun sebuah peraturan baru yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah. Dengan adanya kerja sama ini menjadikan humas di DPRD Kabupaten Pati memiliki sebuah keunggulan atau keistimewaan yang belum tentu dimiliki pihak humas dari setda Pati, walaupun tugas mereka hampir memiliki peran yang sama akan tetapi belum tentu juga pihak humas setda Pati memiliki sebuah kerja sama dengan media massa lain. Adanya keunggulan ini dapat memberikan dampak yang baik kepada humas di DPRD Kabupaten Pati itu sendiri (DPRD Pati, 2019).

Dengan adanya sebuah keunggulan itu seorang humas disekwan dapat memberikan kinerja yang baik dan bagus untuk membantu para anggota dewan dalam penyelesaian masalah maupun dalam menjaga citra baik dari lembaga tersebut (Oscar, 2015).

Korupsi merupakan hal yang tidak asing bagi telinga sebuah tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan di daerah Pati yang dimana melakukan sebuah tindakan korupsi yang merugikan bagi pemerintah maupun masyarakat di Indonesia, ketua majelis menegaskan bahwa seorang yang bernama Mudasir terbukti melakukan tindakan korupsi, pihak terdakwa menyelewengkan dana hibah yang akan digunakan untuk persipa telah dikorupsi, dana hibah tersebut memiliki sejumlah Rp 1,07 miliar. Dalam posisi itu terdakwa tidak merealisasikan dana tersebut sesuai dengan proposal perencanaan. Dengan adanya kasus tersebut bisa membuat kepercayaan masyarakat Pati menurun drastis dan akan memiliki dampak yang cukup besar dalam kelanjutan dari pemerintah daerah Pati itu sendiri (Nazar, 2017).

Hal ini kita bisa melihat sebuah peran dan tugas dari seorang humas di lingkungan sekretariat dewan dimana dari kasus diatas dapat menimbulkan sebuah ketidakpercayaannya dari masyarakat terhadap pihak pemerintah dengan begitu dari seorang humas akan memberikan sebuah penjelasan terkait hal itu untuk mengembalikan citra yang buruk yang tengah dihadapi. Dan dengan adanya sebuah keunggulan atau keistimewaan yang dimiliki oleh humas DPRD Kabupaten Pati dapat memberikan penjelasan atau keterangan tentang kasus diatas agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kembali baik lagi (Melia, 2021).

Berdasarkan sebuah asumsi yang dibangun, penyusun ingin mengetahui peran yang dilakukan seorang humas dalam membantu pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Kabupaten Pati.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif dengan cara pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Straus dan Corbin dalam Creswell (2014) merinci bahwa penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada penelitian dilakukan dan memeriksa kembali sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Creswell (2014) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor Moleong (2017) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Dan penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan fungsi oleh seorang humas diruang lingkup tidak serta merta sendiri akan tetapi peran dan fungsi mereka telah ditetapkan pada sebuah peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh bapak bupati kabupaten Pati, dengan bertujuan adanya sebuah humas akan memberikan dampak yang baik untuk dalam membantu tugas yang dikerjakan

oleh sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pati, dimana telah ditetapkan pada peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan bupati Pati Nomor 83 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pati. Dengan adanya peraturan itu ditetapkan seorang humas di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pati akan membantu segala tugas yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa peran yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang menyebut bahwa humas memiliki empat peran yaitu menurut Dozier dan Broom dalam (Dewi, 2022):

3.1 Peran Humas sebagai Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*),

Dozier dan Broom, (dalam Dewi, 2022) menyebutkan seorang praktisi pakar humas akan berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya, hubungan praktisi pakar humas dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara dokter dan pasien. Artinya pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau diusulkan dari pakar humas tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan humas yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan.

Lembaga humas Sekretariat Dprd Kabupaten Pati akan menjalankan tugas dan perintah yang ditetapkan oleh peraturan yang ada dimana mereka untuk memberikan arahan atau penyelesaian perkara dengan porsi dan tupoksi yang pas agar tidak menimbulkan perkara baru muncul lagi.

Berdasarkan data dan tugas yang ditentukan oleh setda didalam peraturan menyebutkan tidak adanya hal seorang humas menjadi penasihat ahli dimana lembaga humas sekretariat Dprd Kabupaten Pati masih dibawah naungan lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Pati jadi setiap tugas dan fungsi telah ditetapkan diperaturan yang tertera, pihak humas hanya membantu tugas yang berkaitan dengan pemecahan masalah, penyampaian aspirasi, publikasi, menyiapkan reses, mengelola reses dan menyiapkan keperluan yang diperlukan oleh pimpinan dewan untuk kunjungan kerja ke lembaga lainnya.

3.2 Peran Humas Sebagai Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Seorang praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk dengar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut, dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. Dan seorang humas di sekretariat Dprd Kabupaten Pati memberikan sebuah komunikasi dua arah yang dimana akan memberikan sebuah timbal balik kepada seorang komunikator dari pendengar dengan adanya komunikasi dua arah akan terciptanya sebuah penyelesaian yang sangat baik dan benar. Humas di sekretariat Dprd Kabupaten Pati untuk menjalankan komunikasi dua tersebut melakukan sebuah kerja sama dengan pihak media online yang ada di Pati dengan adanya kerja sama tersebut akan membantu seorang humas untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Pati tentang kegiatan para dewan maupun peraturan baru yang dibuat oleh para Dprd. Dengan hal ini akan memberikan timbal balik yang sangat baik bagi pemerintah dengan adanya tingkat kepercayaan masyarakat akan tinggi kepada pemerintah.

3.3 Peran Humas Sebagai Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)

Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan persoalan humas ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (*adviser*) hingga mengambil tindakan eksekusi dalam organisasi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.

Disini humas memberikan sebuah wadah yang dimana akan digunakan untuk membantu penyelesaian masalah yang terjadi antara pihak dewan dengan masyarakat dan humas akan menyiapkan tempat seperti ruangan untuk membantu penyelesaian perkara hal ini disebut dengan audiensi dengan adanya hal itu dpt membantu untuk memecahkan perkara dengan baik dan cepat untuk mencari sebuah solusi yang diperlukan nantinya, dimana seorang anggota dewan tidak akan bisa menyelesaikan perkara sendiri dengan begitu seorang humas didprd kabupaten sangat diperlukan untuk membantu anggota untuk pemecahan perkara.

3.4 Peran Humas Sebagai Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Berbeda dengan tiga peranan praktisi humas profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peranan teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai *journalist in resident* yang

hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *methode of communicatin in organization*. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau tindakan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang digunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari tingkat bawahan ke tingkat atasan. Hal yang sama juga berlaku pada arus dan media komunikasi antara satu level, misalnya komunikasi antar karyawan satu departemen dengan lainnya.

Dalam humas sekretariat Dprd Kabupaten Pati ditemukan beberapa tugas yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan setda yang ditetapkan dan disahkan oleh bapak bupati Pati yang dimana nanti akan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selaku dari kepala sub bagian Humas Ibu Giniarti menuturkan bahwa tugasnya seorang humas ialah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan penyiapan reses, pengelolaan, publikasi, dan membantu tugas para pimpinan anggota dewan, dan menyiapkan segala keperluan yang diperlukan saat adanya acara oleh para anggota dewan terkait.

Humas sekretariat Dprd Kabupaten Pati banyak memiliki sebuah media yang akan digunakan untuk mempermudah publikasi dan sebagainya seperti halnya media massa yang bernama aswara dengan media ini masyarakat akan mengetahui beberapa informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh para anggota dewan, dan bukan media itu saja adapun media online seperti instgram dan facebook dengan adanya media ini akan mempermudah untuk melakukan publikasi tentang hal atau peraturan dan kebijakan baru yang dibuat.

4. Kesimpulan

Peran Humas menurut Dozier dan Broom memiliki empat kategori yaitu Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*), Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*), Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*), dan Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*). Pada hal ini menunjukkan bahwa peran menurut ahli diatas memperlihatkan hanya ada tiga peranan yang terkait dengan fungsi dan tugas di dalam ruang lingkup humas Sekretariat Dprd Kabupaten Pati yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*), Sebagai Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*), dan sebagai Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*) dan yang penasehat ahli tidak termasuk dikarenakan lembaga humas Sekretariat Dprd Kabupaten Pati merupakan lembaga yang masih dibawah naungan pemerintah daerah Pati dimana semua pertanggung jawaban seperti tugas dan fungsi ditetapkan oleh pemerintah daerah Pati. Dengan begitu lembaga ini tidak berdiri sendiri melainkan masih dibawah naungan pemerintah daerah kabupaten Pati.

Setelah mempelajari dan mengetahui hali yang berkaitan dengan peran fungsi humas pemerintah yang dimana menyangkut tentang penelitian dan perkara yang diangkat, kedepannya bisa lebih mengetahui lebih dalam dan jauh lagi tentang peranan fungsi humas diruang lingkup pemerintah di era yang serba terbuka sekarang.

References

- Betty, W. N. (2012). *Humas Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Washington D.C.: Sage.
- Dewi, Y. (2022). *Humas Pemerintah di Tengah Pusaran Covid-19*.
- DPRD Pati. (2019). Renstra Perubahan 2017-2022 BAB I - VIII. Retrieved 19 November 2022, from https://dprd.patikab.go.id/download/file/RENSTRA_-PERUBAHAN_2020_BAB_I-VIII.docx
- Humas. (2014). Inilah Kronologis Hilangnya Pesawat AirAsia QZ8501 Versi Kementerian Perhubungan. Retrieved 19 November 2022, from <https://setkab.go.id/ini-kronologis-hilangnya-pesawat-airasia-qz8501-versi-kementerian-perhubungan/>
- Humas. (2020). Pranata Humas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Harus Makin Kreatif Agar Dapat Berperan Strategis Dalam Mengomunikasikan Program Penanganan Covid-19. Retrieved 19 November 2023, from <https://www.humasindonesia.id/ppid/berita/peran-penting-humas-dalam-penanganan-covid-19-287>
- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 130–140.
- Mauliqa, R. (2021). Peran Humas Pemerintah Sebagai Sarana Komunikasi Publik (Studi Pada Bagian Humas Dan Protokol Pemerintah Kota Bogor). *UG Journal*, 14(7), 13–16.

- Melia, T. A. (2021). *Public Relations Komunikasi Strategis, Digital dan Bertanggung Jawab Sosial*. Bandung: Widina Bhakti.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazar, N. (2017). Korupsi Dana Hibah, Anggota DPRD Pati Dibui 2 Tahun. Retrieved 19 November 2022, from Kompas.com website: <https://regional.kompas.com/read/2017/02/01/14390581/korupsi.dana.hibah.anggota.dprd.pati.dibui.2.tahun>
- Oscar, F. (2015). 5 Kisah Menghilangnya AirAsia QZ8501 Setahun Lalu. Retrieved 19 November 2022, from Liputan 6.com website: <https://www.liputan6.com/news/read/2399235/5-kisah-menghilangnya-airasia-qz8501-setahun-lalu>